

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembangunan Manusia

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan proses multidimensi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan pendapatan nasional semata, tetapi juga mencakup perubahan struktur sosial, institusi, dan sikap masyarakat, serta upaya pengurangan kemiskinan dan ketimpangan (Todaro & Smith, 2015). Paradigma pembangunan kontemporer berkembang ke arah pendekatan yang lebih komprehensif dengan menempatkan manusia sebagai pusat utama pembangunan, sehingga keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi (Nugraha et al., 2025).

Dalam penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pemerintah menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama yang menopang keberhasilan pembangunan (Cahyanti et al., 2021). Firmansyah et al. (2024), menjelaskan bahwa terwujudnya pembangunan sangat bergantung pada peran strategis sumber daya manusia dalam suatu negara. Pembangunan dipahami sebagai upaya menciptakan kondisi masyarakat yang lebih sehat dan memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang produktif. Sejalan dengan paradigma pembangunan, sumber daya manusia kini diposisikan sebagai faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan kualitas yang lebih baik.

Tokoh sentral dalam perubahan paradigma ini adalah Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi yang memperkenalkan pendekatan kapabilitas (*Capability Approach*). Dalam bukunya yang berjudul *Development as Freedom*, Sen memandang pembangunan sebagai suatu proses memperluas kebebasan riil yang dinikmati individu. Sen menegaskan bahwa kesejahteraan tidak dapat diukur hanya berdasarkan kepemilikan pendapatan atau komoditas, melainkan harus dilihat dari kapabilitas individu untuk mencapai berbagai fungsi kehidupan yang bermakna bagi setiap individu (Sen, 1999).

Menurut Sen (1999), pembangunan sebagai proses perluasan kebebasan individu yang diwujudkan melalui lima kebebasan instrumental yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Berikut lima kebebasan instrumental menurut Amartya Sen :

1. Kebebasan Politik (*Political Freedoms*)

Kebebasan politik mencakup hak individu untuk berpartisipasi dalam proses politik, menyampaikan pendapat, memperoleh kebebasan berekspresi, serta mengakses informasi dan media yang bebas. Menurut Sen, kebebasan politik memiliki nilai intrinsik karena merupakan bagian dari kehidupan yang bernilai, sekaligus nilai instrumental karena memungkinkan masyarakat mengawasi pemerintah dan mendorong perumusan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Keberadaan kebebasan politik yang efektif berperan penting dalam mencegah terjadinya krisis kemanusiaan dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

2. Kebebasan Ekonomi (*Economic Facilities*)

Kebebasan ekonomi merujuk pada kesempatan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, seperti bekerja, memproduksi, dan mengakses pasar guna memperoleh pendapatan dan sumber daya ekonomi. Sen menegaskan bahwa pasar bukanlah tujuan akhir pembangunan, melainkan sarana untuk memperluas pilihan dan kapabilitas manusia. Dengan adanya kebebasan ekonomi, individu memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, sehingga mendukung tercapainya pembangunan manusia.

3. Kesempatan Sosial (*Sosial Opportunities*)

Kesempatan sosial mencakup akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas sosial dasar lainnya. Sen menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan memiliki peran strategis sebagai tujuan sekaligus instrumen pembangunan manusia, karena keduanya secara langsung meningkatkan kualitas SDM dan memperluas kebebasan individu dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kesempatan sosial yang memadai berkontribusi besar terhadap peningkatan IPM, khususnya pada dimensi pendidikan dan kesehatan.

4. Jaminan Transparansi (*Transparency Guarantees*)

Jaminan transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi, kejujuran, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Menurut Sen, transparansi penting untuk membangun kepercayaan sosial, mencegah praktik korupsi, dan mengurangi ketidakpastian dalam interaksi

ekonomi maupun sosial. Dengan adanya jaminan transparansi, masyarakat dapat memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan secara adil dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

5. Jaminan Pelindungan Sosial (*Protective Security*)

Jaminan perlindungan sosial merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi yang ekstrem, seperti kemiskinan, pengangguran, dan dampak krisis ekonomi. Bentuk perlindungan ini dapat berupa bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang ditujukan untuk kelompok rentan. Sen menekankan bahwa tanpa perlindungan dasar tersebut, individu dapat kehilangan kapabilitasnya secara drastis, sehingga jaminan perlindungan sosial menjadi elemen penting dalam menjaga dan meningkatkan pembangunan manusia.

2.1.1.1 Human Capital Theory (G. Becker 1993)

Human Capital Theory yang dikembangkan Becker (1993) menempatkan pendidikan, pelatihan, dan kesehatan sebagai bentuk investasi produktif yang melekat pada individu dan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas serta produktivitas tenaga kerja. Becker memandang bahwa pengeluaran untuk pendidikan dan pelatihan bukan sekedar konsumsi, melainkan investasi jangka panjang yang menghasilkan peningkatan pendapatan di masa depan melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan kerja individu. Perspektif ini juga didukung oleh Adriani (2019), yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi yang mendorong peningkatan produktivitas nasional, serta Alifah & Imaningsih (2022) yang menekankan peran pengetahuan sebagai

komponen utama modal manusia dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Investasi dalam *human capital* tersebut memungkinkan individu untuk bekerja lebih efisien, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta memperoleh peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik dibandingkan individu dengan tingkat *human capital* yang lebih rendah.

Lebih lanjut, Becker menegaskan bahwa akumulasi modal manusia tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi secara agregat. Peningkatan kualitas SDM mendorong pertumbuhan produktivitas nasional, mempercepat proses pembangunan, serta memperkuat daya saing suatu wilayah atau negara. Dalam konteks pembangunan ekonomi, *human capital* berperan sebagai faktor kunci yang menjembatani pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena pertumbuhan yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang baik cenderung bersifat lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tidak hanya itu, Todaro & Smith (2015), menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan individu, tetapi juga memberikan dampak sosial yang lebih luas, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan mobilitas sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa mekanisme pasar memiliki keterbatasan dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan secara efisien dan merata, sehingga keterlibatan aktif pemerintah menjadi penting untuk menjamin akses yang adil dan berkualitas. Ketimpangan

akses terhadap pendidikan dan kesehatan antar kelompok sosial dan wilayah juga menjadi perhatian penting, karena kondisi tersebut berpotensi menghambat proses pembangunan manusia apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, *human capital* dipandang sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus sebagai prasyarat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui *Human Development Report* tahun 1990 sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan yang terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi semata. UNDP menegaskan bahwa pembangunan harus berpusat pada manusia, yaitu sebagai proses memperluas pilihan-pilihan dasar manusia (*enlarging people's choices*), terutama kemampuan untuk hidup panjang dan sehat, memperoleh pengetahuan, serta memiliki akses terhadap sumber daya guna mencapai standar hidup yang layak (UNDP, 1990). Pemikiran ini sejalan dengan *Capability Approach* yang dikemukakan oleh Amartya Sen, yang memandang pembangunan sebagai upaya memperluas kebebasan nyata (*real freedoms*) individu untuk mencapai berbagai fungsi kehidupan (*functionings*) yang lebih bermakna. Oleh karena itu, IPM dirancang sebagai indikator komposit yang mengintegrasikan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif, tetapi juga merefleksikan paradigma pembangunan manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan sekadar sarana pertumbuhan

ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, UNDP merumuskan lima poin penting dalam pembangunan manusia, yaitu :

- a. *Sustainable livelihood for all*: menciptakan kesempatan kerja yang layak dan berkelanjutan bagi semua orang.
- b. *Targeted programmes for poverty reduction*: mengarahkan program khusus untuk pengurangan kemiskinan.
- c. *Capacity building and empowerment*: memperkuat kapasitas individu dan lembaga agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
- d. *Basic social services for all*: memastikan akses terhadap layanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan gizi.
- e. *Reproductive health care and equal access to opportunities*: menjamin kesehatan reproduksi serta kesetaraan akses terhadap kesempatan ekonomi dan politik.

Manusia ditempatkan sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan, dengan tujuan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas pilihan dan kemampuan manusia agar dapat hidup sehat, berpendidikan, dan sejahtera. Selain itu, UNDP juga mengemukakan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu :

1. Produktivitas

Peningkatan produktivitas penduduk menjadi elemen penting dalam pembangunan manusia. Hal ini berkaitan erat dengan pengembangan *human capital*, dimana investasi terhadap SDM diarahkan untuk meningkatkan

kapasitas dan kompetensi individu agar dapat berkontribusi secara optimal dalam aktivitas ekonomi maupun sosial.

2. Pemerataan

Setiap individu harus memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi. Menurut UNDP, pembangunan yang tidak merata hanya akan memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus memastikan manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan.

3. Keberlanjutan

Pembangunan manusia harus dirancang secara berkelanjutan, yakni tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi masa kini, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Aspek ini menuntut integrasi antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial dalam setiap kebijakan pembangunan.

4. Pemberdayaan

Pemberdayaan mengacu pada upaya memberikan kebebasan dan kekuatan kepada individu serta komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. UNDP menyatakan bahwa pembangunan manusia yang sejati tercapai ketika masyarakat memiliki kendali atas kehidupan mereka dan mampu memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan UNDP telah diadopsi secara luas oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia mulai menerapkan penghitungan IPM sejak tahun 1996, yang awalnya dilakukan setiap tiga tahun, dan sejak 2004 dihitung setiap tahun untuk mendukung kebutuhan kebijakan nasional, termasuk penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Kementerian Keuangan.

2.1.2.1 Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit yang mengukur tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: (1) kesehatan, diukur melalui angka harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*); (2) pendidikan, diukur melalui tingkat pengetahuan; dan (3) standar hidup layak, diukur melalui pendapatan atau pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Tujuan utama IPM adalah menilai sejauh mana suatu negara atau daerah berhasil memperluas pilihan dasar manusia dalam ketiga aspek tersebut (*enlarging people's choices*).

1. Dimensi Kesehatan (Usia Harapan Hidup)

Dimensi kesehatan menggambarkan kemampuan masyarakat untuk hidup panjang dan sehat, yang diukur melalui Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH). Karena data kematian sering terbatas, AHH dihitung secara tidak langsung dari informasi mengenai anak lahir hidup dan anak yang masih hidup, kemudian diolah menggunakan program MORTPAK. Hasil AHH tersebut selanjutnya distandarkan agar dapat dibandingkan antarwilayah.

2. Dimensi Pendidikan (Pengetahuan)

Pengetahuan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat. UNDP mengukur dimensi pendidikan melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), RLS menunjukkan lama pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan perkiraan lama sekolah anak usia tujuh tahun ke atas. Kedua indikator ini digabungkan menjadi Indeks Pendidikan sebagai cerminan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

3. Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mencapai kesejahteraan ekonomi. UNDP mengukurnya melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*), karena indikator ini lebih menggambarkan daya beli riil dibandingkan PDB per kapita. Pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, PDRB per kapita tidak dianggap sensitif dalam menilai standar hidup, sehingga digunakan konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan sebagai indikator yang lebih relevan (Faqihudin, 2010).

2.1.2.2 Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia, setiap dimensi dalam IPM distandarisasi menggunakan nilai maksimum dan minimum sebelum dihitung menjadi indeks gabungan. Tahapan ini bertujuan untuk menyatukan berbagai

indikator penyusun IPM ke dalam satu ukuran yang seragam dan terukur. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Kesehatan

Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat dijalani seseorang sejak kelahirannya, dihitung berdasarkan data dari sensus dan survei kependudukan.

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHHmin}{AHHmax - AHHmin}$$

2. Dimensi Pendidikan

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh penduduk usia 15 tahun ke atas. Sementara itu, harapan lama sekolah menunjukkan perkiraan lama pendidikan yang akan ditempuh anak usia tujuh tahun ke atas di masa mendatang.

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLSmin}{RLSmax - RLSmin}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLSmin}{RLSmax - RLSmin}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{IHLS + IRLS}{2}$$

3. Dimensi Hidup Layak

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan dihitung berdasarkan nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan dihitung pada tingkat kabupaten/kota.

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran min)}{\ln(pengeluaran maks) - \ln(pengeluaran min)}$$

Rata-rata geometrik yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Keterangan :

$I_{kesehatan}$: Angka harapan hidup

$I_{pendidikan}$: Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah

$I_{pengeluaran}$: Pengeluaran per kapita yang disesuaikan

2.1.2.3 Perbedaan Metode Perhitungan Lama dan Baru

United Nations Development Programme (UNDP) telah memperkenalkan metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) yang baru dengan sejumlah perubahan mendasar dibandingkan metode sebelumnya. Setidaknya terdapat dua aspek utama yang mengalami transformasi signifikan, yaitu pemilihan dan komposisi indikator serta cara penghitungan indeks secara keseluruhan. Perubahan pada indikator mencakup penyesuaian variabel dan dimensi yang digunakan, sedangkan perubahan pada mekanisme penghitungan meliputi pendekatan matematis serta bobot yang berbeda dari metode lama, sehingga menghasilkan nilai dan peringkat IPM yang lebih mencerminkan realitas pembangunan manusia saat ini.

Dalam metode baru IPM, UNDP memperkenalkan dua indikator pengganti yang lebih relevan, harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) menggantikan angka melek huruf yang sudah hampir maksimal di banyak negara, serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang menggantikan PDB per kapita. Selain itu, cara agregasi indeks diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-

rata geometrik. Pendekatan ini membuat nilai IPM lebih sensitif terhadap ketimpangan antar dimensi (umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup), sehingga mengharuskan ketiga dimensi berkembang secara seimbang agar indeks keseluruhan tetap tinggi.

Tabel 2. 1 Perbandingan Metode Perhitungan

Indikator	Metode Lama	Metode Baru
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pendidikan	1. Angka Melek Huruf (AHM) 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	1. Harapan Lama Sekolah (HLS) 2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Agregasi Indeks	Rata-rata hitung $IPM = \frac{1}{3} (I_{Kes} + I_{Pend} + I_{Pendapatan}) \times 100$	Rata-rata ukur/Geometrik $IPM = \sqrt[3]{I_{kes} + I_{pend} + I_{pengeluaran}} \times 100$

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada intinya, perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan yang logis dan rasional. Sebuah indeks komposit harus mampu mengukur aspek yang menjadi tujuannya secara akurat. Pemilihan metode dan variabel yang tepat memastikan bahwa indeks yang dihasilkan relevan. Namun, terdapat dua alasan utama yang menjadi dasar perubahan metodologi penghitungan IPM, yaitu:

1. Ketidaksesuaian indikator lama

Angka Melek Huruf dianggap kurang efektif karena nilainya sudah tinggi di banyak daerah sehingga tidak mampu menunjukkan variasi kualitas pendidikan. Demikian pula, PDB per kapita dinilai kurang akurat karena sebagian pendapatannya tidak dinikmati penduduk lokal. Karena itu, kedua

indikator tersebut diganti dengan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.

2. Perubahan metode agregasi

Penggunaan rata-rata aritmatika dinilai kurang tepat karena capaian rendah pada satu dimensi dapat tertutupi oleh capaian tinggi pada dimensi lain. Dengan memakai rata-rata geometrik, UNDP memastikan setiap dimensi berkontribusi secara seimbang sehingga hasilnya lebih mencerminkan pemerataan pembangunan manusia.

Tabel 2. 2 Nilai Maksimum Dan Minimum Komponen IPM

KOMPONEN	MINIMUM	MAKSIMUM
Angka Harapan Hidup (tahun)	20	85
Harapan Lama Sekolah (tahun)	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	0	15
Daya Beli (rupiah)	1.007.436	25.572.352

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut UNDP, IPM dihitung berdasarkan nilai gabungan dari tiga dimensi utama pembangunan manusia, yang masing-masing distandarisasi terlebih dahulu menggunakan nilai minimum (min) dan maksimum (max). Setelah distandarisasi, ketiga dimensi tersebut digabungkan dengan bobot yang sama (masing-masing satu pertiga) untuk menghasilkan nilai komposit IPM antara 0 hingga 1, di mana:

- 0 menunjukkan tingkat pembangunan manusia terendah, dan
- 1 menunjukkan tingkat pembangunan manusia tertinggi.

Nilai IPM suatu wilayah kemudian diklasifikasikan oleh UNDP ke dalam empat kategori skala pembangunan manusia, yaitu:

1. Rendah (*Low Human Development*) : $IPM < 60$
2. Menengah (*Medium Human Development*) : $IPM 60 - 69$
3. Tinggi (*High Human Development*) : $IPM 70 - 79$
4. Sangat tinggi (*Very High Human Development*) : $IPM \geq 80$

2.1.2.4 Tujuan dan Manfaat IPM dalam Pembangunan Daerah

Adapun tujuan pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain:

- a. Mengukur dimensi-dimensi utama dalam pembangunan manusia yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- b. Memberikan dasar penelitian terhadap tingkat pembangunan suatu negara atau daerah sebagai tolak ukur perbandingan.
- c. Menjadi acuan dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia antarwilayah.
- d. Menghasilkan suatu indeks komposit yang menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi secara terpadu.
- e. Menyediakan ukuran kuantitatif yang mampu menilai aspek sosial dan ekonomi dalam pembangunan.

Sementara itu, manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain:

- a. Berfungsi sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan manusia dan kualitas hidup penduduk.
- b. Menentukan peringkat atau tingkat pencapaian pembangunan antarwilayah atau antarnegara.

- c. Di Indonesia, IPM memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai ukuran kinerja pemerintah, tetapi juga sebagai salah satu dasar dalam penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) antar daerah.

2.1.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan salah satu sumber daya domestik yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Annisa & Handayani, 2021). Investasi atau penanaman modal menjadi tahapan dasar yang diperlukan untuk memulai proses pembangunan (Loeis & Setiawina, 2020). Secara umum, pembangunan membutuhkan dukungan modal dan kapital dalam jumlah besar agar suatu daerah dapat berkembang dan maju (Sandya & Hakim, 2023).

Penanaman modal dalam negeri merupakan aktivitas investasi yang dilakukan oleh investor domestik untuk menjalankan usaha di wilayah negaranya sendiri. Selain itu, PMDN berperan dalam membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dan membantu menurunkan tingkat pengangguran karena mampu mendorong perkembangan proses industrialisasi (Pratama & Rofiuddin, 2023). Investasi dalam bentuk barang modal tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memperluas penyerapan tenaga kerja dan memperkuat kemampuan teknologi. Secara lebih luas, investasi menjadi instrumen strategis untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan. Pada dasarnya, tujuan utama investasi adalah mendorong ekspansi usaha sehingga aktivitas ekonomi dapat berkembang secara berkelanjutan (Annisa & Handayani, 2021).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1968 pasal 1 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang dimaksud modal dalam negeri ialah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Pihak-pihak yang dapat melakukan penanaman modal dalam negeri meliputi beberapa kelompok, yaitu perorangan yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di Indonesia, serta badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Ketiga kelompok ini memiliki kewenangan untuk menanamkan modalnya dalam kegiatan usaha di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3.1 Asas dan Tujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Berdasarkan UU RI pasal 3 No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Keterbukaan
- c. Akuntabilitas
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara
- e. Kebersamaan
- f. Efisiensi berkeadilan
- g. Berkelanjutan
- h. Berwawasan lingkungan

- i. Kemandirian, dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas-asas ini menjadi dasar setiap kegiatan penanaman modal agar proses investasi dapat berjalan secara sehat, transparan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian. Dengan berpegang pada asas tersebut, penyelenggaraan penanaman modal diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan strategis. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan UU RI pasal 3 No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Secara keseluruhan, berbagai tujuan tersebut menunjukkan bahwa penanaman modal memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional. Melalui investasi yang terarah dan berlandaskan asas-asas yang telah ditetapkan, penanaman modal tidak hanya berfungsi menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya

saing, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan penanaman modal merupakan salah satu pilar utama dalam upaya pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.1.3.2 Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Kebijakan dasar penanaman modal merupakan pedoman yang disusun pemerintah untuk mengarahkan penyelenggaraan investasi di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang stabil, transparan, dan mampu menarik investor, sekaligus memastikan bahwa kegiatan penanaman modal dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan ekonomi. Dengan adanya kebijakan dasar ini, pemerintah ingin memastikan bahwa investasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi perekonomian nasional. Berdasarkan UU RI No 25 Tahun 2007, kebijakan dasar ditetapkan untuk:

- 1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- 2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- 3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

2.1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang aktif terlibat di pasar kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Indikator ini mencerminkan seberapa besar proporsi tenaga kerja yang tersedia dan siap berkontribusi dalam proses produksi barang dan jasa. TPAK juga digunakan sebagai salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat dalam perhitungan IPM (Nastiti & Nailufar, 2023). Menurut Simanjuntak & Payaman (1985), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja didefinisikan sebagai rasio antara jumlah angkatan kerja dengan total penduduk usia kerja pada kelompok umur yang sama. Dengan kata lain, TPAK mengukur seberapa besar proporsi penduduk usia produktif yang secara aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi (baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan). Simanjuntak dan Payaman kemudian merumuskan TPAK secara matematis sebagai berikut:

$$\text{TPAK (\%)} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja (baik yang sudah bekerja maupun yang aktif mencari kerja) dengan total penduduk usia kerja (umumnya 15-64 tahun), biasanya dinyatakan dalam persentase. Dengan kata lain, TPAK mencerminkan seberapa besar proporsi penduduk usia produktif yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. TPAK bukan hanya indikator tenaga kerja, tetapi juga salah satu penentu penting pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ketika nilai TPAK tinggi atau terus meningkat, semakin banyak penduduk yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, sehingga beban ketergantungan (*dependency ratio*) menurun dan tingkat ketimpangan pendapatan cenderung berkurang. Hal ini terjadi karena semakin meluasnya kesempatan kerja dan pendapatan yang diperoleh penduduk secara langsung mengurangi konsentrasi kekayaan pada segelintir orang saja. Oleh karena itu, TPAK yang tinggi menjadi salah satu faktor kunci dalam mengurangi disparitas pendapatan antar kelompok masyarakat.

Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bekerja, sekaligus mengindikasikan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia. Jika produktivitas tenaga kerja ikut meningkat, maka daya jual pekerja di pasar tenaga kerja akan lebih tinggi, yang pada akhirnya mendorong kenaikan upah serta meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Maulina & Andriyani, 2020). Halawa & Manalu (2024) menjelaskan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah.

TPAK adalah rasio antara angkatan kerja (yang bekerja atau mencari kerja) dengan total penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK, semakin kuat pertumbuhan ekonomi karena lebih banyak tenaga kerja yang produktif. Hal ini mendorong terciptanya lapangan kerja baru, meningkatkan permintaan tenaga kerja, dan pada akhirnya memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Dalam upaya mempersiapkan pembangunan manusia, suatu daerah tentu membutuhkan peran dan dukungan pemerintah. Dukungan tersebut direalisasikan melalui pengalokasian anggaran pada sektor-sektor strategis yang mendukung pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Tingkat keberhasilan pembangunan manusia selanjutnya dapat dilihat dari tinggi rendahnya nilai IPM (Septiani, 2022). Belanja bantuan sosial merupakan salah satu komponen pengeluaran/belanja pemerintah yang termasuk dalam klasifikasi ekonomi. Belanja ini mencakup berbagai program yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kerentanan ekonomi (Harsono et al., 2024).

A. A. R. Putri & Ribawati (2025), menjelaskan bahwa belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran pemerintah yang bersumber dari APBN maupun APBD, yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tunai atau pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang bersifat sementara maupun berkelanjutan. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, memulihkan fungsi sosial, serta mendorong kemandirian penerima. Secara

umum, bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif, bantuan produktif, maupun dukungan kepada lembaga kemasyarakatan.

2.1.5.1 Asas dan Tujuan Kesejahteraan Sosial (Bansos)

Berdasarkan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berlandaskan undang-undang tersebut penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:

- a. Kesetiakawanan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keterpaduan;
- e. Kemitraan;
- f. Keterbukaan;
- g. Akuntabilitas;
- h. Partisipasi;
- i. Profesionalitas; dan
- j. Keberlanjutan

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2019), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan aktivitas ekonomi yang mengakibatkan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Secara umum, pertumbuhan ekonomi kinerja suatu negara dalam mengembangkan sektor produksinya, baik melalui peningkatan *output* industri, perluasan infrastruktur, penambahan fasilitas pendidikan, peningkatan produksi sektor jasa, maupun pertumbuhan barang modal. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan nyata dari kapasitas produksi suatu negara, yang biasanya diukur melalui persentase kenaikan pendapatan nasional riil dalam periode tertentu.

Laju pertumbuhan ekonomi mengacu pada perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) periode tertentu dengan PDB periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan *output*

agregat, yaitu total barang dan jasa yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi, atau yang dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB).

PDB merupakan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi yang beroperasi di dalam suatu negara, baik yang dimiliki oleh penduduk setempat maupun oleh pihak asing (Sukirno, 2019). Karena itu, indikator yang umum digunakan untuk menilai laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB secara nasional atau PDRB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK), yang menggambarkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu (Devanantyo, 2021).

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produk barang dan jasa mengalami peningkatan. Untuk mengukur berapa pertumbuhan ekonomi secara angka aritmatika. Pada umumnya perhitungan pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDB (nasional) atau PDRB (regional) dengan menggunakan rumus:

$$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_t$ = PDRB tahun tertentu

$PDRB_{t-1}$ = PDRB tahun sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan pemerintah dalam mendorong pembangunan. Setiap negara berupaya

mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal karena tingkat pertumbuhan yang dicapai mencerminkan kemajuan pembangunan di suatu wilayah atau negara (A. A. Putri et al., 2024)

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial demi menjamin kesejahteraan generasi saat ini dan mendatang. Salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah mencapai pemerataan, yang didasarkan pada beberapa faktor, termasuk pemerataan kondisi ekonomi melalui distribusi kesejahteraan yang seimbang (Hulu & Wahyuni, 2021).

2.1.6.1 Ukuran Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh peningkatan aktual dalam produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, diperlukan perhitungan pendapatan nasional riil, yang dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB).

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Bagi negara berkembang, Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator utama untuk menilai kinerja ekonomi. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri dalam suatu periode, baik oleh perusahaan domestik maupun asing. Karena produksi di dalam negeri juga melibatkan faktor produksi dari luar negeri, seluruh nilai *output* tersebut tetap dihitung sebagai bagian dari pendapatan nasional. Secara

umum, PDB diukur melalui tiga pendekatan: produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yang lebih tepat untuk menilai kesejahteraan suatu daerah karena hanya mencakup aktivitas ekonomi pada tingkat regional. Dalam teori ekonomi, upah mempengaruhi kemauan individu untuk bekerja, sementara kemampuan bekerja ditentukan oleh kesehatan, keterampilan, dan keahlian. Tingkat keterampilan tersebut umumnya dibentuk melalui pendidikan formal dan non-formal seperti pelatihan kejuruan.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil kajian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Pengaruh PMDN, TPAK, Belanja Bantuan Sosial dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Priangan Timur Tahun 2020-2024. Tujuan dari kajian penelitian terdahulu ini adalah untuk memberikan landasan yang kuat serta sebagai bahan perbandingan terhadap hasil analisis yang akan dilakukan oleh penulis.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(Balighoh & Tsani, 2025) Analisis Determinan Indeks Pembangunan	Variabel independen : TPAK	PDRB Per Kapita, UMR, Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan & Kesehatan)	TPAK berdampak positif signifikan terhadap IPM.	Jurnal EMT KITA Vol. 9 No. 3, 2025.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Manusia di Jawa Tengah Tahun 2014-2022 Menggunakan Metode <i>System Generalized Method of Moments</i>	Variabel dependen : IPM			
2	(Loeis & Setiawina, 2020) Pengaruh Belanja Daerah, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2010-2020	Variabel independen : PMDN Variabel dependen : IPM	Belanja Daerah, PMA	PMDN berpengaruh positif serta signifikan terhadap IPM.	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana (E-Jurnal EP Unud), Vol. 11 No. 2, Hal. 495-506
3	(Annisa & Handayani, 2021) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah Tahun 2012-2018	Variabel independen : Pertumbuhan Ekonomi, PMDN Variabel dependen : IPM	Belanja Modal, PMA	Pertumbuhan ekonomi, dan PMDN berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM.	Diponegoro Journal of Economics Vol. 10 No. 1 Tahun 2021
4	(Kuswanto, 2021) <i>The Impact of Economic Growth on the Human Development Index in Jambi Province in 2004-2019</i>	Variabel independen : Pertumbuhan Ekonomi Variabel dependen : IPM	-	Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.	<i>Asian Journal of Economics, Business and Accounting</i> 21(12): 22-28, 2021; Article no.AJEB A.72631
5	(Sumiyarti & Lazuardy, 2023) Pengaruh Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap	Variabel independen : Pertumbuhan Ekonomi, Variabel dependen : IPM	Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan,	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM	Media Ekonomi Vol. 31 No. 2 Oktober 2023 : 181 - 194

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	IPM di Provinsi Jawa Barat				
6	(Magdalena Laode et al., 2020) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (2015-2018)	Variabel independen : Pertumbuhan Ekonomi Variabel dependen : IPM	Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 20 No. 02 Tahun 2020
7	(Nisa & Maria, 2022) Determinan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2021	Variabel independen : TPAK Variabel dependen : IPM	Kemiskinan dan TPT	TPAK berpengaruh positif signifikan, terhadap IPM.	Diponegoro Journal Of Economics Vol . 11, No. 4 (2022) 47-58
8	(Rudatin & Suwito, 2025) Dinamika Indeks Pembangunan Manusia di Bangka Belitung: Peran pengangguran, kemiskinan, dan partisipasi kerja	Variabel independen :TPAK Variabel dependen : IPM	Pengangguran dan Kemiskinan	TPAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan , Volume 4 Issue 2, 2025: 247-254
9	(Salsabila & Hasmarini, 2023) Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa: Analisis Data Panel Tahun 2014-2021	Variabel independen : Pertumbuhan Ekonomi, PMDN Variabel dependen : IPM	Jumlah penduduk	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, PMDN berpengaruh positif dan signifikan.	Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), Vol. 11 No. 1 (2023).
10	(Hafifah & Suherty, 2023) Pengaruh PDRB, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan	Variabel independen : TPAK Variabel dependen : IPM	PDRB, Kemiskinan	TPAK berpengaruh positif tidak signifikan.	JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 6 No. 2, 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2020				
11	(Williyan & Hasmarini, 2024) Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita , Jumlah Penduduk Miskin dan Investasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021	Variabel independen : Penanaman Modal Dalam Negeri Variabel dependen : IPM	PDRB Per Kapita , Jumlah Penduduk Miskin	PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA, 8(1), 2024, 226-234
12	(Burhanudin et al., 2025) <i>Economic Growth And Development In Indonesia Human</i>	Variabel independen : Pertumbuhan Ekonomi Variabel dependen : IPM	-	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	International Journal of Humanity Advance, Business & Sciences (IJHABS) Volume 3 No. 1.1 2025
13	(Halawa & Manalu, 2024) Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Variabel independen : LPE, TPAK Variabel dependen : IPM	TPT, Tingkat Kemiskinan	Laju pertumbuhan ekonomi, TPAK, memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM,	Journal Economic and Strategy (JES), Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2024 pp. 111–125
14	(Manopo et al., 2024) Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Kinerja Pendidikan, PMA, PMDN, dan Konsumsi Masyarakat dalam	Variabel independen : PMDN Variabel dependen : IPM	Pengeluaran Pemerintah, Kinerja Pendidikan (APK & APM), PMA, Konsumsi Masyarakat	PMDN berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 24 No. 3, Maret 2024.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara				
15	(Apriska et al., 2024) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Kabupaten/Kota di Provinsi NTB)	Variabel independen : Pertumbuhan Ekonomi, Variabel dependen : IPM	Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Kemiskinan	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.	JSEH- Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, Vol. 10 No. 1, Maret 2024
16	(Septiani, 2022) Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2020	Variabel independen : Belanja Bantuan Sosial Variabel dependen : IPM	Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah	Belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM. Secara simultan, seluruh jenis belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.	Syntax Idea: p- ISSN: 2684-6853 e- ISSN: 2684-883X Vol. 4, No. 9, September 2022
17	(Gumede et al., 2024) <i>The Impact Of Government Spending On Well-Being : A Case Of Upper Middle-Income Countries And High-Income Countries</i>	Variabel independen : <i>Government spending on social protection</i> Variabel dependen : IPM	<i>Government spending on education, Government spending on health</i>	<i>Government spending on social protection</i> berpengaruh positif signifikan terhadap IPM	<i>Cogent Economics & Finance</i> 2024, Vol. 12, No. 1, 2413657
18	(Awary & Nilasari, 2025) <i>The Influence of Poverty, Unemployment, and Economic Growth on the Human</i>	Variabel independen : Pertumbuhan Ekonomi Variabel dependen : IPM	Pengangguran Kemiskinan,	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.	Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR), Vol. 4,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Development Index (HDI) in East Java Province 2020-2023</i>				No. 4, 2025
19	(Harsono et al., 2024) Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi NTB Tahun 2013-2022	Variabel independen : Belanja Bantuan Sosial Variabel dependen : IPM	Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan	Penelitian di Provinsi NTB periode 2013-2022 menunjukkan bahwa belanja pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan kontribusi 92,1%. Secara parsial, hanya belanja kesehatan yang berpengaruh positif dan signifikan, sementara belanja pendidikan dan belanja bantuan sosial tidak signifikan terhadap IPM.	Managem ent Studies and Entrepreneurship Journal Vol 5(1) 2024 : 802-810 The
20	(A. A. R. Putri & Ribawati, 2025) Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Belanja Bantuan Sosial, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2020-2024	Variabel independen : Belanja Bantuan Sosial Variabel dependen : IPM	Pajak Daerah, Tingkat Kemiskinan	Belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM.	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 4 No. 3, Desember 2025
21	(Tamara & Yeniwati, 2020) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Bantuan Sosial dan Kesehatan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pendidikan Terhadap Indeks	Variabel independen : Belanja Bantuan Sosial Variabel dependen : IPM	Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Konsumsi Rumah Tangga dan Pendidikan	Pengeluaran pemerintah di bidang bantuan sosial berpengaruh positif namun tidak signifikan.	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Volume 2, Nomor 3, September 2020, hal 57-62

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan Manusia Indonesia	di			

2.2 Kerangka Pemikiran

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komprehensif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat serta efektivitas kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, IPM menjadi tujuan strategis dalam pembangunan wilayah, termasuk di Priangan Timur yang masih menunjukkan capaian IPM relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut menuntut adanya identifikasi faktor-faktor ekonomi yang berperan dalam mendorong peningkatan IPM.

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi IPM adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMDN memiliki hubungan positif terhadap IPM karena peningkatan investasi domestik dapat mendorong ekspansi kegiatan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh Annisa & Handayani (2021) Salsabila & Hasmarini (2023) dan Manopo et al. (2024), menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh positif terhadap IPM.

Dalam jangka panjang, peningkatan investasi juga berkontribusi pada penyediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kondisi tersebut membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengakses

layanan dasar serta meningkatkan standar hidup layak, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan IPM.

Selain PMDN, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga memiliki keterkaitan dengan IPM. TPAK yang tinggi mencerminkan semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Peningkatan partisipasi tenaga kerja berpotensi meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat, sehingga mendorong peningkatan IPM. Keterlibatan tenaga kerja yang produktif mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Temuan penelitian dari Balighoh & Tsani (2025) dan Hafifah & Suherty (2023), memperlihatkan bahwa TPAK berpengaruh positif terhadap IPM. Namun demikian, pengaruh tersebut sangat bergantung pada kualitas pekerjaan yang tersedia, sehingga TPAK yang tinggi tidak selalu secara otomatis meningkatkan IPM apabila didominasi oleh sektor informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang rendah.

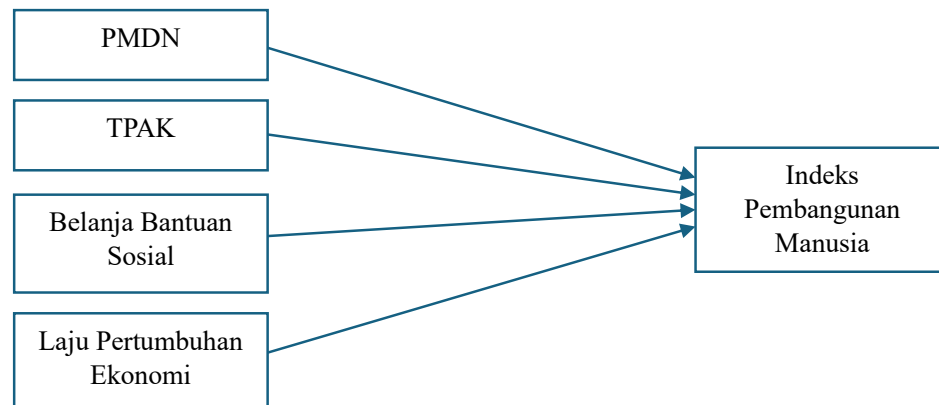
Bantuan sosial merupakan salah satu komponen belanja pemerintah yang termasuk dalam klasifikasi belanja berdasarkan aspek ekonomi (Harsono et al., 2024). Bantuan sosial diberikan untuk membantu masyarakat rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Apabila dikelola secara efektif, peningkatan belanja bantuan sosial dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah dan mengurangi kerentanan sosial. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tamara & Yewati (2020), yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial berpengaruh positif terhadap IPM. Belanja bantuan sosial memiliki peran strategis

dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia karena secara langsung menysasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga mampu memperbaiki capaian dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup secara lebih merata. Dengan demikian, efektivitas dan ketepatan sasaran program bantuan sosial menjadi faktor kunci dalam mendorong peningkatan IPM di suatu daerah khususnya di Priangan Timur.

Laju pertumbuhan ekonomi juga memiliki hubungan positif terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mencerminkan naiknya aktivitas produksi dan pendapatan masyarakat, serta memperbesar kapasitas fiskal pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Dengan meningkatnya pendapatan dan kualitas layanan dasar, capaian IPM cenderung mengalami perbaikan. Penelitian yang dilakukan oleh Apriska et al. (2024), (Sumiyarti & Lazuardy, 2023) dan Awary & Nilasari (2025), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Temuan tersebut menggambarkan adanya keterkaitan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dengan demikian, ketika suatu wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, IPM cenderung ikut meningkat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PMDN, TPAK, belanja bantuan sosial, dan laju pertumbuhan ekonomi merupakan variabel-variabel ekonomi yang saling berkaitan dan berperan dalam membentuk kualitas pembangunan manusia. Keempat variabel tersebut diasumsikan memiliki pengaruh terhadap IPM di wilayah Priangan Timur selama periode 2020-2024. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaruh

masing-masing variabel tersebut terhadap IPM, baik secara parsial maupun simultan, guna memperoleh gambaran empiris mengenai faktor dominan dalam peningkatan IPM serta sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan temuan empiris sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga PMDN, TPAK, belanja bantuan sosial dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Priangan Timur tahun 2020-2024.
2. Diduga PMDN, TPAK, belanja bantuan sosial dan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Priangan Timur tahun 2020-2024.